

pengumpulan data terkait penanganan COVID-19 sebagai bahan kajian kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Burhan Asofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dharma Setyawan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- HAW. Widjaja. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Gaffar Jenedjri. 2012. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Cet. 1*. Jakarta: Konstitusi Press.
- M. Solly Lubis. 1983. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Bandung: Alumi.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MPR RI. 2003. *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- MPR RI. 2015. *Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 2020. *Rencana Operasi Pandemic Response - Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- R. Sugiharto Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Ronny Hanitijo Soemitro. 2001. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanti Sunarmo. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supami Pamuji. 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Utang Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wawan Mas'udi, Poppy S. Winanti. 2020. *Tata Kelola Penanganan COVID-19 Di Indonesia: Kajian Awal*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Atika Zahra Rahmayanti. 2014. Peran Desentralisasi Fiskal Dalam Manajemen Bencana Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 22. No. 1.
- Direktoran Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*.
- Ni Ketut Sri Utari, Nyoman Mas Aryani, A.A. Parwati. 2014. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 6 No. 2.
- R. Julio Prasetyo. 2019. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. *Jurist-Diction*. Vol.2 No. 3.
- Shanti Dwi Kartika. 2015. Politik Hukum Penanggulangan Bencana. *Journal Kajian*, Vol.20 No. 4.
- Wardatul Fitri. 2020. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum* Vol. 9 No. 1.
- Zulkarnain Ridlwan. 2012. Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana=

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedarudatan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Provinsi Jawa Tengah

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/116 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Website

<https://www.who.int/> diakses pada 31 Maret 2020, pukul 19.45 WIB

<https://covid19.go.id/> diakses pada 04 November 2020, pukul 20.30
WIB

<https://corona.jatengprov.go.id/> diakses pada 10 Januari 2021, pukul
13.55 WIB